

RENCANA STRATEGIS 2021-2026

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



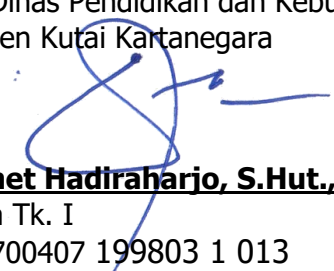
KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen penting dalam pemerintahan yang berisi upaya-upaya pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, kerangka pendanaan, sampai dengan kerangka regulasinya dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Perangkat dari Kementerian/Lembaga yang berada di daerah menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2021-2026, serta dilaksanakan oleh seluruh stakeholders jajaran Pendidikan dan Kebudayaan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusunan Renstra yang telah membantu penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini melalui proses top-down dan bottom-up serta seluruh pihak yang telah tulus membimbing dalam penyempurnaan penyusunan Renstra ini. Semoga upaya-upaya yang secara maksimal telah dilakukan menjadi persembahan terbaik bagi peningkatan kinerja masa depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan guna tercapainya sasaran pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021- 2026 mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin.

Tenggarong, 1 September 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara



H. Slamet Hadiraharjo, S.Hut.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700407 199803 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB. I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	10
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21
BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Daerah Terpilih.....	25
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...	27
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional/ Dinas pendidikan dan Kebudayaan.....	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	31
BAB.IV. TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	37
BAB.V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	45
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	45
BAB.VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	50
BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	88
BAB. VIII. PENUTUP.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan merupakan hak asasi atau hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Peningkatan layanan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati Tahun 2021. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah tahapan lima (5) tahun dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu **"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"**.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021-2026 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang pembangunan harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi, sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah. Untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur. Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 2023;
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman bagi seluruh jajaran pengelola pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara serta instansi lainnya dalam melaksanakan dan merumuskan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun ke depan (2021-2026), sehingga tercipta keselarasan perencanaan peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan penyusunan Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi bagi semua pihak pelaku pelaksana pendidikan (stake holders).
2. Merumuskan tujuan, strategi dan kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya secara proporsional.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Bab I ; Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra-SKPD, maksud dan sistematika penulisan.
- Bab II ; Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berisikan Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sumber daya, Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bab III ; Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi dan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , telaahan visi/misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penetapan isu- isu strategis.

- Bab IV ; Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Tujuan merupakan jabaran Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan yang diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
- Bab V ; Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam rangka merealisasikan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, maka perlu dirumuskan Strategi dan Kebijakan strategis yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dan tercapainya misi.
- Bab VI ; Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif, berisikan uraian dan penjelasan yang bersifat khusus dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya yang sah Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
- Bab VII ; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- BabVIII ; Penutup.

BAB II

GAMBARAN LAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. KEDUDUKAN :

Kedudukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang membawahi 18 UPT Layanan Kependidikan di 18 Kecamatan serta 3 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), uraian tugas dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. TUGAS POKOK:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

3. FUNGSI :

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- b. perumusan kebijakan teknis operasional, bimbingan dan pembinaan urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan UPT Layanan Kependidikan dan Sanggar Kegiatan Belajar;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal/Informal (PNFI), membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu PAUD-PNFI;
 - 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD-PNFI
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD-PNFI.

- d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
- e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum dan Pengembangan Mutu SMP;
 - 2) Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter SMP;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNFI;
 - 2) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD;
 - 3) Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP.
- g. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Sejarah Lokal dan Pelestarian Budaya Daerah;
 - 2) Seksi Pembinaan Kesenian Tradisional, Bahasa dan Sastra Daerah;
 - 3) Seksi Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Sumber Daya Aparatur
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional

Jumlah Pegawai : 7.682 orang

Kualifikasi Pendidikan	:	S2	=	82 orang
		S1	=	3.744 orang
		D3	=	207 orang
		D2	=	1.364 orang
		D1	=	152 orang
		SMA	=	2.023 orang
		SMP	=	69 orang
		SD	=	41 orang

Pangkat dan Golongan	:	IV	=	2.984 orang
		III	=	3.315 orang
		II	=	1.342 orang

Jabatan Struktural	:	-	Eselon II	=	1 orang
		-	Eselon III	=	5 orang
		-	Eselon IV	=	50 orang

Jabatan Fungsional	:	-	Pengawas	=	238
		-	Pamong Belajar	=	12
		-	Pengawas SLB	=	1

- Guru PNS = 6.787
- Guru PNS SLB = 13

Pendidikan dan Diklat :

- PIM II = 1 orang
- PIM III = 5 orang
- PIM IV = 36 orang.

a. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

b. Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup representatif yang terletak di Jalan Lais Kelurahan Timbau Tenggarong dalam kondisi baik.

d. Sarana Kendaraan Operasional

- Kendaraan Roda Dua
- Kendaraan Roda Empat

e. Sarana Komputer

- Komputer
- Laptop

e. Telekomunikasi dan Infromasi

- Telepon/Faximile
- Internet Jardiknas

f. Peralatan Mensin

- Generator

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dianalisa untuk dapat menunjukkan seberapa besar perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan pendidikan dan kebudayaan, seberapa kuat daya dukung sumber daya perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, tingkat ketercapaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan.

Data capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2019-2020 berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 32 Tahun 2018

- a. Capaian Partisipasi penduduk pada setiap jenjang Pendidikan : *Prosentase jumlah anak berdasarkan umur yang sudah tamat atau sedang belajar pada jenjang/jenis Pendidikan :*

No	Jenis Pelayanan Dasar Penerima Pelayanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar	Kelompok Umur	Skor Maks	Realisasi	
				2019	2020
1	Pendidikan anak usia dini	Warga negara usia 5 s.d. 6 tahun.	100%	93,65%	93,83%
2	Pendidikan dasar	Warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.	100%	103,00%	100,99%
			100%	109,56%	100,02%
3	Pendidikan kesetaraan	Warga negara usia 7 s.d. 18 tahun.	100%	45,12%	48,13%

b. Capaian Standar Satuan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi	
		Indikator	Skor Max	2019	2020
1	PAUD	1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan	100%	65,63%	82,89%
		2) Standar Isi	100%	45,63%	84,64%
		3) Standar Proses	100%	60,42%	91,55%
		4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	100%	63,75%	36,90%
		5) Standar Sarana & Prasarana	100%	66,17%	67,04%
		6) Standar Pengelolaan	100%	42,27%	85,91%
		7) Standar Pembiayaan	100%	33,75%	76,61%
		8) Standar Penilaian Pendidikan	100%	67,50%	80,21%
2	SD	1) Standar kompetensi lulusan	7,00	6,25	6,02
		2) Standar isi	7,00	5,82	5,72
		3) Standar proses	7,00	6,57	6,18
		4) Standar sarana dan prasarana	7,00	3,89	5,51
		5) Standar pengelolaan	7,00	5,79	6,39
		6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7,00	4,14	4,85
		7) Standar pembiayaan	7,00	5,62	5,75
		8) Standar penilaian	7,00	6,08	5,54
3	SMP	1) Standar kompetensi lulusan	7,00	6,24	5,84
		2) Standar isi	7,00	5,98	5,53
		3) Standar proses	7,00	6,51	6,02
		4) Standar sarana dan prasarana	7,00	3,95	5,17

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi	
		Indikator	Skor Max	2019	2020
		5) Standar pengelolaan	7,00	5,78	6,06
		6) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7,00	4,26	4,89
		7) Standar pembiayaan	7,00	5,71	5,63
		8) Standar penilaian	7,00	6,07	5,22
4	Pendidikan Kesetaraan	1) Standar kompetensi lulusan	100%	58,92%	60,23%
		2) Standar isi	100%	65,68%	67,69%
		3) Standar proses	100%	65,64%	70,79%
		4) Standar sarana dan prasarana	100%	61,35%	61,68%
		5) Standar pengelolaan	100%	59,64%	67,64%
		6) Standar pembiayaan	100%	35,34%	50,87%
		7) Standar penilaian	100%	38,95%	48,66%
		8) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	29,56%	31,43%

2. Standar biaya pribadi Peserta Didik

Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan perlengkapan belajar

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		
		Indikator	Realisasi Jumlah siswa Miskin	
1	Perlengkapan dasar Peserta Didik		2019	2020
	1) PAUD	a) Terpenuhinya buku gambar 6 buah per peserta didik per semester	2.502 Orang	2.745 Orang
		b) Terpenuhinya buku dan alat tulis 1 set paling sedikit 12 warna per peserta didik per semester	2.502 Orang	2.745 orang
	2) SD	a) terpenuhinya buku teks pelajaran 1 paket per peserta didik per tahun	13.934 Orang	14.326 Orang
		b) Terpenuhinya perlengkapan belajar (alat dan buku tulis)1 set per peserta didik per semester	13.934 Orang	14.326 Orang
	3) SMP	a) terpenuhinya buku teks pelajaran 1 paket per peserta didik per tahun	7.069 Orang	7.253 Orang
		b) Terpenuhinya perlengkapan belajar (alat dan buku tulis)1 set per peserta didik per semester	7.069 Orang	7.253 Orang

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		
		Indikator	Realisasi Jumlah siswa Miskin	
	4) Pendidikan Kesetaraan	a) terpenuhinya buku modul 1 paket per peserta didik per tahun	761 Orang	806 Orang
		b) Terpenuhinya perlengkapan belajar (alat dan buku tulis) 1 set per peserta didik per semester	761 Orang	806 Orang

Biaya operasional sebagai pemenuhan pembiayaan Pendidikan dasar

2	Pembiayaan pendidikan	Indikator	Capaian realisasi	Bentuk Intervensi
	1) Pembiayaan pendidikan Dasar	a) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah	Siswa PAUD, SD dan SMP yang berada di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah telah dibebaskan biaya pendidikan	Bantuan Operasional Kabupaten : • PAUD : Rp. 250.000 per siswa per tahun • SD : Rp. 400.000 per siswa per tahun • SMP : Rp. 600.000 per siswa per tahun
		b) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.	Target 100% seluruh satuan pendidikan menetapkan besarnya pembiayaan pendidikan atas pertimbangan komite	• PAUD : 344 lembaga 100% • SD : 33 sekolah 100% • SMP : 44 sekolah 100% • Kesetaraan : 14 lembaga 89%

3. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

No	Jenis PTK	Indikator	Target Capaian	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1.	Guru PAUD	a) Rasio Jumlah guru yang dimiliki dengan jumlah rombongan belajar	1 : 1	1.707 : 1.616 (1 : 1)	1,07 : 1
		b) Prosentase jumlah guru paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang PAUD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	62,27% (1.063 : 1.707)	64,70%

No	Jenis PTK	Indikator	Target Capaian	Realisasi 2019	Realisasi 2020
		c) Prosentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	100%	21,4%	21,4%
	Kepala Sekolah	a) Prosentase kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%	100%
		b) Prosentase kepala sekolah PAUD yang memiliki sertifikat pendidik; dan	100%	90,00%	90,80%
		c) Prosentase kepala sekolah PAUD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100%	31,9%	32,5%
2.	SD Guru Kelas	a) Rasio Jumlah guru kelas yang dimiliki dengan jumlah rombongan belajar	1 : 1	1 : 1 (4.224 : 4.485)	1 : 1
		b) Prosentase jumlah guru kelas paling rendah memiliki ijazah S1/DIV bidang SD, Kependidikan lain atau psikologi.	100%	90,25% (3665 : 4061)	91,85%
		c) Prosentase guru kelas yang memiliki sertifikat pendidik	100%	59,66% (2.613 : 4.061)	63,20%
	Guru Mata Pelajaran	a) Rasio guru mata pelajaran yang dimiliki dengan kebutuhan guru	1 : 1	Kebutuhan : 555 Guru yang ada : 479	0,88 : 1
		b) Prosentase jumlah guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah S1/DIV.	100%	92,90% (1.270 : 1.367)	92,90%
		c) Prosentase guru mata pelajaran yang memiliki sertifikat pendidik	100%	34,9% (477 : 1.367)	34,78%
	Kepala Sekolah	a) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%	100%
		b) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki sertifikat pendidik; dan	100%	100%	95,56%
		c) Prosentase kepala sekolah SD yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100%	83,2%	85,62%
	Tenaga penunjang lainnya.	a) Rasio Jumlah tenaga penunjang lainnya dengan jumlah satuan pendidikan	1 : 1	(350 : 372)	0,81 : 1
		b) prosentasi tenaga penunjang lainnya yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	100%	(350 : 372)	100%
3	SMP Guru Mata Pelajaran	a) Rasio guru mata pelajaran yang dimiliki dengan kebutuhan guru	2310 : 2310	78,70% (1818 : 2310)	80,9% (1868 : 2310)

No	Jenis PTK	Indikator	Target Capaian	Realisasi 2019	Realisasi 2020
		b) Prosentase jumlah guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah S1/DIV.	100%	95,3%	95,3%
		c) Prosentase guru mata pelajaran yang memiliki sertifikat pendidik	100%	56,3%	56,3%
	Kepala Sekolah	a) Prosentase kepala sekolah SMP yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%	100%
		b) Prosentase kepala sekolah SMP yang memiliki sertifikat pendidik; dan kependidikan	100%	100%	91,03%
		c) Prosentase kepala sekolah SMP yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk SMP formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan SMP nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100%	94,4% (135 : 143)	78,6%
	Tenaga penunjang lainnya.	a) Rasio Jumlah tenaga penunjang lainnya dengan jumlah satuan pendidikan	2 : 1	191,6% (247 : 143)	1,81 : 1 (263:145)
		b) prosentasi tenaga penunjang lainnya yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	100%	191,6% (247 : 143)	100%
4.	Pendidikan Kesetaraan Tutor	a) Rasio tutor pendidikan kesetaraan yang dimiliki dengan kebutuhan tutor/Pamong belajar dengan kebutuhan guru	100%	55,45% (122 : 220)	55,45%
		b) Prosentase jumlah tutor/Pamong belajar pendidikan kesetaraan paling rendah memiliki ijazah S1/DIV	100%	39,34% (48 : 122)	78,87%
		c) Prosentase tutor/Pamong belajar pendidikan kesetaraan yang memiliki sertifikat pendidik	100%	84,42% (103 : 122)	84,42% (103:122)
	Kepala Sekolah	a) Prosentase kepala SKB dan PKBM yang memiliki ijazah paling rendah D-IV /S1;	100%	100%	100%
		b) Prosentase kepala SKB dan PKBM yang memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala SKB dan PKBM dari lembaga pemerintah yang berwenang.	100%	10%	10,00%
	Tenaga penunjang lainnya.	a) Rasio Jumlah tenaga penunjang lainnya dengan jumlah satuan pendidikan	100%	100%	100%
		b) prosentasi tenaga penunjang lainnya yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	100%	100%	100%

Dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, perbandingan capaian kinerja antara Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Indikator Kinerja merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan indikator kinerja perangkat daerah yaitu untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel.

Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Strategi
Banyak potensi budaya di kabupaten Kutai Kartanegara tidak tergali dan termanfaatkan dengan baik	Kekayaan budaya belum termanfaatkan secara maksimal baik sebagai obyek wisata maupun sarana Pendidikan	- Situs dan cagar budaya belum terpelihara dengan baik - Nilai-nilai budaya local semakin tergerus oleh kemajuan jaman dan teknologi - Pelestarian nilai dan kekayaan budaya belum dilakukan secara maksimal	- Identifikasi dan Pencatatan kekayaan Budaya - Pelestarian cagar budaya dengan melibatkan masyarakat setempat - Pembinaan Lembaga dan kelompok seni - Pemberdayaan masyarakat atau Lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai budaya - Revitalisasi bangunan-bangunan cagar budaya - Memaksimalkan gelar seni sebagai wahana ekspolrasi nilai budaya

Sampai dengan saat ini masih banyak cagar budaya yang sudah diinventarisir namun belum diregistrasi dan ditetapkan secara resmi. Dan pembentukan Badan Penetapan Cagar Budaya (BPCB) sampai saat ini belum terbentuk. Hal ini salah satu yang menghambat dari pemanfaatan cagar budaya tersebut.

Pembinaan kesenian tradisional selama ini sudah berjalan walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada.

Hambatan dalam pengelolaan dan pemeliharaan museum sampai saat ini terkendala belum mempunyai SK Penetapan sehingga tidak bisa menerima bantuan anggaran dari pusat, dimana salah satu dasar untuk mendapatkan bantuan anggaran dari pusat adalah memiliki SK Penetapan.

Tabel TC-23

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik				20	30	30	40	45	20	20	30	40		100	66,67	100	100	
3	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP				82	87	87	89	93	12,43	20,37	28,06	89		15,16	23,4	32,23	100	
4	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
5	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
6	Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit				80	100	100	100	100	100	100	100	100		125	100	100	100	
7	Angka Partispasi Kasar PAUD				77,5	77,85	77,9	78	78,1	82,5	80,5	77,87	93,83		106,5	103,4	99,96	120,3	
8	Persentase sekolah PAUD terakreditasi				18	20	50	67	80		20	54,9	69		0	100	109,8	103	
9	Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				0	0	2,5	3	3,2	0	0	3,9	4,1		0	0	156,8	136,7	
10	Angka Melek Huruf				99,93	99,47	99,47	99,61	99,75	99,9	99,94	99,52	99,65		99,97	100,5	100,1	100	

11	Cakupan Penanganan Putus Sekolah				0	0,02	0,02	50	90	0	0	0,01	0,008		0	0	50	0,016	
12	Cakupan penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup yang aktif				30,3	30,3	30,3	60,61	84,85	0	30	30,3	60,61		0	99,01	100	100	
13	Angka Partisipasi Kasar SD/MI				100	100	100	100	100	100	100	108,3	101		100	100	108,3	101	
14	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs				94,5	95,5	95,5	96,75	96,8	94,5	95	99,74	100		100	99,48	104,4	103,4	
15	Angka Partisipasi Murni SD/MI				99,86	99,69	99,69	99,7	99,71	99,67	99,96	99,87	99,88		99,81	100,3	100,2	100,2	
16	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs				93,91	92,25	92,25	92,5	92,75	91,75	93,92	94,15	94,45		97,7	101,8	102,1	102,1	
17	Indeks Mutu Pendidikan SD				4,4	5,2	5,2	5,5	5,8		4,8	5,7	5,8		0	92,31	109,6	105,5	
18	Indeks Mutu Pendidikan SMP				4,3	5	5	5,4	5,6		4,6	5,7	5,6		0	92	114	103,7	
19	Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				3,97	4,56	4,56	5,1	5,8		1	4,3	5,1		0	21,93	94,3	100	
20	Cakupan cagar budaya dan Museum yang dilestarikan dan dikelola				1,74	1,74	34,3	69,2	100		2	16,83	34,3		0	114,7	49,06	49,57	
21	Cakupan Pelestarian Budaya Daerah				75	75	75	100	100		75	65	75		0	100	86,67	75	
22	Sekolah Terakreditasi				94	95	96			94	95	96			100	100	100		
23	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terpadu (SIMPEDU)				11	13	15			11	13	15			100	100	100		

24	Persentase Siswa Penerima Beasiswa KUKAR CERDAS				12	13	14			12	13	14			100	100	100		
25	Jumlah Museum yang dikelola				2	2	2			2	2	2			100	100	100		
26	Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan				94	95	95			0	95	95			0	100	100		
27	Jumlah perlindungan karya seni				0	0	10			0	0	10			0	0	100		
28	Misi Kesenian Daerah yang di adakan				0	0	1			0	0	1			0	0	100		
29	Cakupan Fasilitasi seni budaya				0	0	78			0	0	78			0	0	100		
30	Cakupan Gelar Seni				0	0	81			0	0	81			0	0	100		
31	Jumlah grup kesenian				0	0	95			0	0	95			0	0	100		
32	Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya				76	78	80			0	78	80			0	100	100		
33	Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya				18	20	22			0	20	22			0	100	100		
34	Cakupan pembinaan seni budaya				0	100	100			0	0	100			0	0	100		
35	Cakupan Kajian Seni budaya				0	55	61			0	0	61			0	0	100		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Fokus pembangunan pendidikan adalah Peningkatan Layanan Akses Pendidikan dan Peningkatan Mutu pendidikan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan diukur dari Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Terkait hal ini dapat dilihat pada tabel perbandingan Harapan lama sekolah dan Rata Rata lama sekolah dari kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan Timur di bawah ini :

HARAPAN LAMA SEKOLAH

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	12.65	12.96	12.98	12.99	13	13.1
Kutai Barat	12.3	12.75	12.82	12.88	12.89	12.9
Kutai Kartanegara	13.25	13.26	13.56	13.57	13.58	13.59
Kutai Timur	12.43	12.44	12.48	12.65	12.78	12.89
Berau	13.17	13.18	13.29	13.3	13.31	13.32
Penajam Paser Utara	12.02	12.46	12.53	12.54	12.55	12.56
Mahakam Ulu	12.03	12.42	12.47	12.48	12.5	12.51
Balikpapan	13.46	13.59	13.75	14.12	14.13	14.14
Samarinda	14.17	14.23	14.64	14.66	14.7	14.89
Bontang	12.77	12.79	12.88	12.89	12.9	13.03
Kalimantan Timur	13.18	13.35	13.49	13.67	13.69	13.72

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	8.12	8.19	8.2	8.22	8.54	8.55
Kutai Barat	8.02	8.03	8.06	8.07	8.34	8.47
Kutai Kartanegara	8.68	8.71	8.83	8.84	9.1	9.22
Kutai Timur	8.69	8.72	9.06	9.08	9.18	9.19
Berau	8.62	8.78	8.96	8.98	9.25	9.52
Penajam Paser Utara	7.59	7.6	7.95	8.03	8.16	8.28
Mahakam Ulu	7.36	7.37	7.68	7.69	7.89	7.97
Balikpapan	10.44	10.54	10.55	10.65	10.67	10.68
Samarinda	10.31	10.33	10.34	10.46	10.47	10.48
Bontang	10.38	10.39	10.7	10.72	10.73	10.79
Kalimantan Timur	9.15	9.24	9.36	9.48	9.7	9.77

Angka rata-rata lama sekolah penduduk masih sebesar 9.22 , sehingga pendidikan kesetaraan masih menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjamin menjadi program yang berkelanjutan untuk peningkatan keterlayanan masyarakat terhadap akses pendidikan. Peningkatan angka partisipasi murni dengan menekankan layanan pendidikan sesuai dengan jenjang usia penduduk dan jenjang pendidikan menjadi perhatian agar tidak terjadi ketimpangan daya serap penduduk terhadap mutu pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan sarana prasarana pendidikan di seluruh jenjang pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan pendidikan, termasuk pembangunan ruang kelas baru, menuntaskan Rehabilitasi sekolah rusak berat dan rusak sedang, pengadaan meubelair siswa dan guru, pembangunan perpustakaan, laboratorium dan UKS, dan pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi ujung tombak pelayanan pendidikan. Prosentase pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di seluruh jenjang pendidikan baru mencapai 80 %. Masih banyaknya jumlah pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV ini antara lain lebih banyak pada jenjang pendidikan dasar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengoptimalkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi bagi pendidik maupun tenaga kependidikan, yakni dengan membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang besar menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar mampu mengoptimalkan aparatur pendidik dan tenaga kependidikan melalui tata kelola dan manajemen yang baik, sehingga tidak terjadi kesenjangan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan. Selain kondisi di atas, dilihat dari studi analisa lingkungan strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dipetakan dengan melakukan analisa SWOT (Strong, Weakness, Opportunity dan Threatmen) adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Adanya amanat Undang Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan harus dialokasikan sekurangnya sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Adanya kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di daerah;
- 3) Meningkatnya Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;

- 4) Adanya komitmen Bupati Kutai Kartanegara terpilih yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama program pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
- 5) Komitmen yang kuat dari aparatur di lingkungan pendidikan untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih dan layanan prima pendidikan melalui penandatanganan Pakta Integritas setiap tahun.

b. Kelemahan

- 1) Belum semua Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2010 ditindaklanjuti menjadi Peraturan Bupati yang menjadi sumber hukum penyelenggaraan teknis pendidikan daerah;
- 2) Masih kurangnya kompetensi dan sikap profesional aparatur;
- 3) Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Belum optimalnya sistem manajemen dan tata kelola pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 5) Terbatasnya sarana prasarana pendukung kinerja organisasi;
- 6) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sarana prasarana sekolah;
- 7) Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan pendidikan antar jenjang pemerintahan;
- 8) Belum terbentuknya sistem pengawasan internal maupun aparat pengawasan internal pemerintahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mengawasi, mengendalikan dan menjamin agar kinerja pelayanan pendidikan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Penataan, perekrutan, pemetaan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan belum berjalan efektif;
- 10) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 11) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komputer dalam pelayanan pendidikan;

2. Kondisi Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari total APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2) Anggaran Pendidikan yang dialokasikan melalui APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur sangat besar dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah;

- 3) Pengembangan model pendidikan yang kreatif, edukatif dan variatif dapat dijadikan terobosan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan;
- 4) Pertumbuhan dunia usaha dan industri lokal maupun nasional dapat menjadikan peluang untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja yang terampil dan potensial;
- 5) Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan andil dalam peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Ancaman

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional yang belum stabil dan dampak krisis ekonomi global berdampak terhadap penurunan kemampuan pemerintah dan orang tua dalam membiayai pendidikan;
- 2) Potensi daerah yang kurang menyerap sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, berdampak pada meningkatnya pengangguran usia produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat di tengah pertumbuhan anak didik tanpa diikuti dengan pengawasan dan pengendalian dari orang tua dapat memicu peningkatan kenakalan remaja;
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pendidikan;
- 5) Mentalitas aparatur yang masih lemah dan kurangnya keinginan untuk berkarya;
- 6) Penyelenggaraan pendidikan belum mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja;
- 7) Kemungkinan masih belum hilangnya pandemi Covid-19 yang sangat merubah secara drastis tatanan pembelajaran

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

a. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Keberadaan Lembaga PAUD (Formal dan Non Formal) belum merata di pelosok desa di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Belum maksimalnya akreditasi lembaga pendidikan anak usia dini, termasuk peningkatan mutu PAUD maupun kesejahteraan guru PAUD;
4. Masih banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S1/D-IV;
5. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, karena masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan PAUD itu tidak penting, baik melalui TK/RA/BA maupun Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak/sejenisnya, sehingga masyarakat lebih condong untuk memasukan anaknya langsung ke Sekolah Dasar sekalipun usianya masih belum cukup.

b. Layanan Pendidikan Dasar

1. Angka Partisipasi Murni SD belum mencapai angka 100 persen, yaitu baru 99,86%;
2. Angka Partisipasi Murni SMP belum mencapai angka 100 persen, yaitu baru mencapai 91,75 % ;
3. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sekolah sesuai standar pelayanan minimal (SPM) masih rendah;
4. Masih terdapat guru SD dan SMP yang belum layak mengajar karena belum berkualifikasi kurang dari S1/D-IV;
5. Masih terdapat guru SD dan SMP yang kualifikasi S1/D4 tidak linear dengan mata pelajaran yang diampunya;
6. Masih terdapat kekurangan jumlah guru PNS SD mata pelajaran Agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha dan Guru PNS SD mata pelajaran Pendidikan Jasmani;
7. Banyaknya jabatan kepala sekolah yang kosong pada jenjang SD dikarenakan belum terpenuhinya syarat calon kepala sekolah yang memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah;
8. Masih terdapat siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar;

9. Rerata nilai ujian nasional SD dan SMP/ Sederajat masih kurang dari rerata Provinsi Kalimantan Timur;
10. Masih banyak sekolah dasar yang kekurangan ruang kelas dan belum memiliki perpustakaan, ruang kepala sekolah/ guru dan TU, ruang UKS;
11. Masih terdapat SMP yang belum memiliki Lab Komputer dan Lab Bahasa serta belum meratanya tenaga pustakawan dan laboran untuk menunjang kualitas pembelajaran;
12. Kebijakan tidak ada pungutan sekolah pada jenjang pendidikan dasar menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung dan menjamin kepastian masyarakat mendapatkan pendidikan yang bebas pungutan dan berkualitas.
13. Masih banyak sekolah SMP yang belum memiliki guru mata pelajaran.

c. Layanan Pendidikan Non Formal

1. Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan non formal masih kurang;
2. Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal;
3. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non formal;
4. masih banyak penduduk usia produktif yang belum mempunyai ketrampilan dan kemandirian;
5. Belum adanya pemetaan terhadap masyarakat yang membutuhkan pendidikan non formal

d. Layanan Pendidikan Masyarakat dan Kecakapan Hidup

1. Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan masyarakat masih kurang;
2. Kurangnya lembaga pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan pelatihan;
3. Belum optimalnya akses UPT Sanggar Kegiatan Belajar bagi masyarakat;
4. Kurangnya bantuan sarana prasarana untuk peningkatan mutu pendidikan masyarakat;
5. Daya serap pendidikan masyarakat terhadap kebutuhan pasar masih kurang;
6. Hasil lulusan pendidikan masyarakat belum sepenuhnya mampu menekan angka pengangguran masyarakat pada usia produktif;
7. Belum optimalnya layanan pendidikan orang dewasa dan pendidikan kecakapan hidup.

e. Layanan Birokrasi Internal dan Manajemen Pendidikan

1. Belum adanya standar operasional prosedur, standar minimal pendidikan daerah, maupun kode etik profesional kinerja yang mendukung pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 2 Belum optimalnya akses teknologi informasi dan penerapan ICT untuk pengelolaan pendidikan dan mendukung realisasi manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel;
- 3 Belum optimalnya tata kelola pendidikan termasuk belum adanya ISO 9001: 2000 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4 Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan;
- 5 Ketimpangan kualifikasi sumber daya manusia aparatur yang ada dengan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks

f. Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan

- 1 Belum semuanya satuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan terakreditasi minimal Baik (B);
- 2 Belum adanya sekolah dasar unggulan disetiap kecamatan;
- 3 Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan;
- 4 Belum optimalnya penerapan dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan;
- 5 Belum adanya pemetaan dan penataan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung untuk periode tahun 2021-2026, maka dalam merencanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih adalah: **"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".**

Sedangkan misi yang telah ditetapkan adalah:

- 1 Memanfaatkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
- 2 Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
- 3 Memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4 meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
- 5 meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Misi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pendidikan termaktub dalam Misi 2 yaitu "Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya".

Yang termasuk dalam program prioritas dalam urusan pendidikan adalah upaya peningkatan pencapaian SPM Bidang Pendidikan dan Program Kukar Idaman. Dimana program Kukar Idaman bisa mengungkit capaian SPM. Adapun strategi dan sasaran yang terkait dengan urusan pendidikan antara lain sebagai berikut:

- 1 Program Bea Siswa bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi;
- 2 Program 1000 guru sarjana. Hal ini untuk menaikkan SPM Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3 Program Kampung pintar dan perpustakaan kampung; Program Gerakan gemar mengaji (GEMA) Sedangkan prioritas agenda kegiatan di Bidang Pendidikan antara lain:
- 4 Peningkatan kualitas sekolah dari sisi sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik sehingga mampu memperoleh akreditasi/pengakuan yang baik;
- 5 Pengawasan dan pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan yang sudah berjalan agar tepat sasaran dan efektif;
- 6 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang telah ada;
- 7 Peningkatan kualitas dan sarana pendidikan Non formal untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja;
- 8 Penguatan pendidikan life skills (kecakapan hidup) yang mencakup aspek kecakapan personal (budi pekerti/akhlak), sosial;
- 9 Pembuatan kelas inklusi/sekolah berkebutuhan khusus;
- 10 Penghargaan terhadap siswa berprestasi ;

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

a. Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, kebijakan pendidikan nasional diarahkan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan Rencana dengan itu, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan visi: terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk Insan Indonesia yang Cerdas Komprehensif.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

- 1 Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat;
- 2 Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan;
- 3 Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
- 4 Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik .

Misi rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental yang dapat dilihat dari tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

- 1 Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
- 2 Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
- 3 Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
- 4 Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajaryang kondusif agar anak nyaman belajar;
- 5 Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
- 6 Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
- 7 Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

b. Rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Rencana Strategis pembangunan pendidikan yang mengusung visi: Terwujudnya SDM Kaltim yang bertaqwa, unggul dan berbudaya melalui pembinaan dan pengembangan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Sedangkan misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Meningkatkan pendidikan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membina mutu dan relevansi pendidikan.
3. Meningkatkan manajemen pendidikan.
4. Membina dan mengembangkan generasi muda, olahraga, bahasa, seni, dan budaya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penentuan Isu, Asumsi dan Prioritas Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih serta telaahan terhadap rencana strategis pembangunan pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat ditentukan

isu, asumsi dan prioritas strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

a. Isu Strategis

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan secara optimal karena belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
3. Kurangnya layanan penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal serta belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang selama ini masih banyak menumpuk di tempat yang lebih dekat dengan ibukota kecamatan;
6. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur;
7. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan.

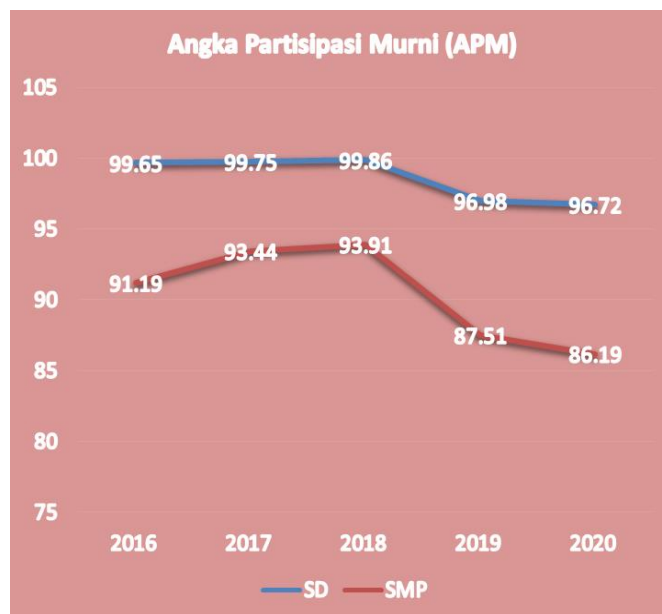
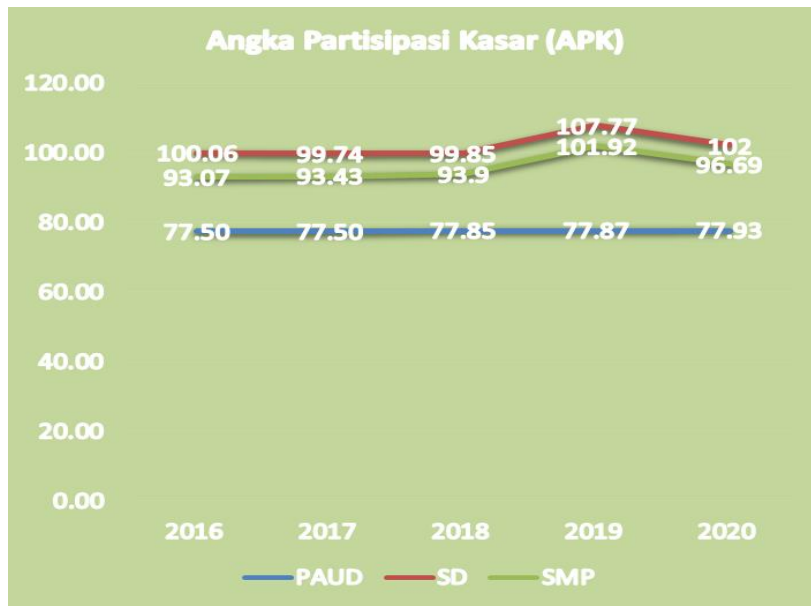
b. Asumsi dan Prioritas Strategis

Asumsi dan Prioritas strategis merupakan hasil simpulan dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan yang dianalisa berdasarkan analisa SWOT yang dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan pendidikan. Beberapa asumsi dan prioritas strategis yang dapat disimpulkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa;
2. Peningkatan layanan kepastian dan jaminan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Perluasan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus disetiap sekolah dengan memaksimalkan peran kelas inklusi;
4. Peningkatan layanan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat termasuk peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal;
5. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik, peningkatan presentase siswa lulus ujian nasional dengan rata-rata nilai yang baik serta peningkatan prestasi belajar dan akademik;
6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatnya prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Peningkatan layanan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur;
8. Peningkatan penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Gambaran Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan pencapaian indikator lima tahun yang akan datang dapat dilihat pada gambar grafik dan table dapat dilihat sebagai berikut:



DATA PENDIDIKAN DAERAH

SATUAN PENDIDIKAN	1.246	PENDIDIK	11.165
PAUD	533	PAUD	1.989
SD	471	SD	5.520
SMP	143	SMP	1.931
SMA	50	SMA	907
SMK	44	SMK	761
SLB	5	SLB	57
PESERTA DIDIK	167.640	RUANG KELAS	7.266
PAUD	21.295	PAUD	1.177
SD	88.123	SD	4.067
SMP	29.624	SMP	1.034
SMA	15.851	SMA	498
SMK	12.443	SMK	450
SLB	304	SLB	40
TENDIK	1.686	ROMBEL	7.873

TENDIK	1.686	ROMBEL	7.873
PAUD	558	PAUD	1.509
SD	445	SD	4.174
SMP	308	SMP	1.106
SMA	202	SMA	545
SMK	166	SMK	480
SLB	7	SLB	59

Sumber: Data verifikasi PDSPK, Juli 2019

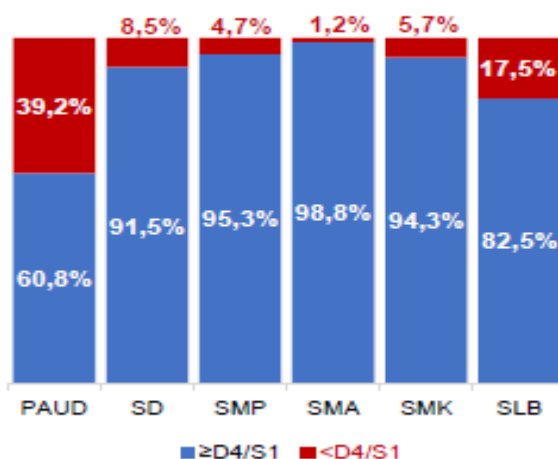
2.

SISWA PUTUS SEKOLAH DAN MENGULANG

	SD	SMP	SMA	SMK
PUTUS SEKOLAH	65	68	33	57
MENGULANG	1.578	131	51	103

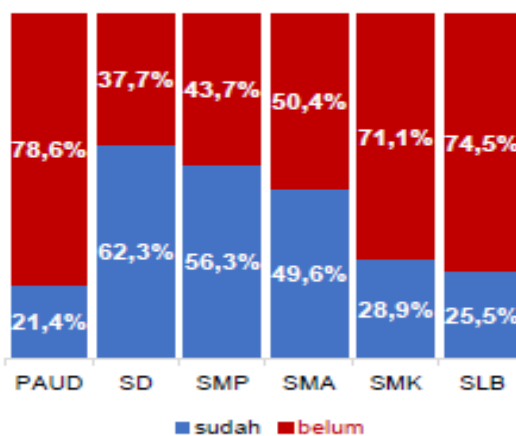
Sumber: Data verifikasi PDSPK, Juli 2019

KUALIFIKASI PENDIDIK



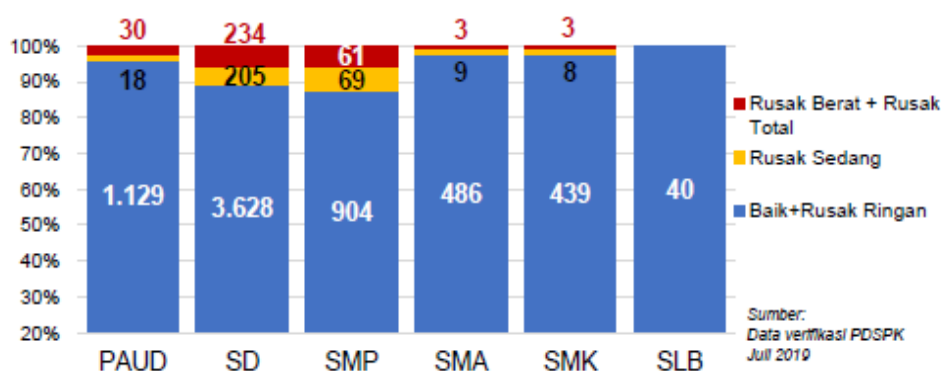
Sumber: Data verifikasi PDSPK, Juli 2019

PENDIDIK TERSERTIFIKASI



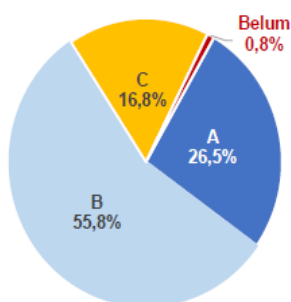
Sumber: Ditjen. GTK, November 2019

KONDISI RUANG KELAS



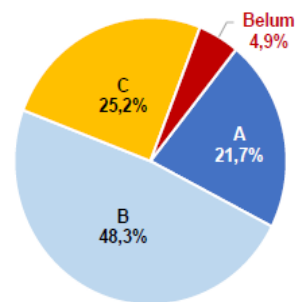
KAB. KUTAI KARTANEGARA

SD



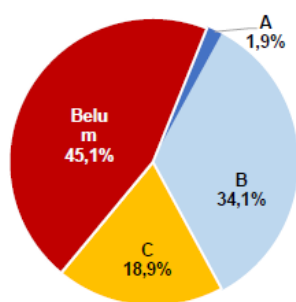
AKREDITASI SEKOLAH

SMP

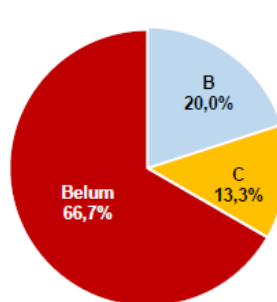


AKREDITASI PAUD DAN PNF

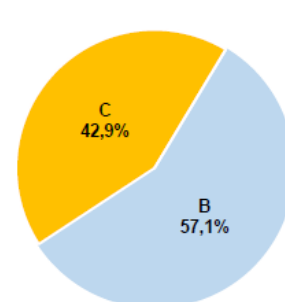
PAUD



LKP



PKBM



Sumber: BAN PAUD dan PNF, Desember 2019

KEBUDAYAAN

JENIS	JUMLAH
Cagar Budaya	371
Desa Adat	0
Museum	2
Komunitas Budaya	3

Sumber: Ditjen. Kebudayaan, November 2019

Dari grafik dan tabel diatas, rencana yang akan dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran- sasaran untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dan tercapainya misi. Terkait dalam pencapaian Misi 2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak mulia, unggul dan berbudaya”, ada dua urusan yang ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan. Sehubungan dengan kedua urusan tersebut dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Tujuan

Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dalam urusan Pendidikan adalah Meningkatkan Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan.

b. Sasaran

Meningkatnya Perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas

c. Strategi

- 1) Peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa;
- 2) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatnya prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidikan dan tenaga kependidikan;
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar yang bermutu, relevan dan memperhatikan kearifan lokal
- 4) Meningkatkan kualitas Pendidikan Menengah Pertama yang bermutu, relevan dan memperhatikan kearifan local
- 5) Penambahan Pendidikan non formal
- 6) Peningkatan Mutu layanan pendidikan non formal/kesetaraan
- 7) Meningkatkan penyelenggaraan penunjang urusan perangkat daerah

d. Arah Kebijakan

- 1) Arah kebijakan untuk strategi yang pertama adalah :
 - a) Pemenuhan sarana dan prasarana yang belum tersedia
 - b) Pemenuhan akses pendidikan bagi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar bagi siswa tidak mampu
 - c) Pemenuhan standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Arah kebijakan untuk strategi yang kedua adalah :
 - a) Melakukan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal

- b) Peningkatan Sumber daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui Diklat, PPG dan Pelatihan Guru
 - c) Merevitalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) Jenjang PAUD dalam rangka peningkatan mutu tenaga pendidik
 - d) Pemberian beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi Strata 1 (S1)
 - e) Penyediaan alokasi Bantuan Operasional Sekolah bagi Pendidikan Anak Usia Dini
- 3) Arah kebijakan untuk strategi yang ketiga adalah :
- a) Pemenuhan standar sarana dan prasarana yang belum tersedia
 - b) Merevitalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) jenjang pendidikan Sekolah Dasar dalam rangka peningkatan mutu tenaga pendidik
 - c) Pemberian beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1
 - d) Penyediaan alokasi Bantuan Operasional Kabupaten jenjang pendidikan Sekolah Dasar
 - e) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
 - f) Pemenuhan SPM Kebutuhan belajar bagi siswa tidak mampu
- 4) Arah kebijakan untuk strategi yang keempat adalah :
- a) Merevitalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam rangka peningkatan mutu tenaga pendidik yang dinaungi dalam pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
 - b) Pemberian beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1
 - c) Penambahan guru Bimbingan Konseling (BK).
 - d) Pemenuhan SPM kebutuhan belajar bagi siswa tidak mampu
 - e) Peningkatan mutu tenaga pustakawan dan laboran dalam rangka pencapaian SPM Pendidikan.
- 5) Arah kebijakan untuk strategi yang kelima adalah :
- a) Memberikan kemudahan dalam perizinan pendirian untuk lembaga pendidikan non formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM)
 - b) Menambah lembaga pendidikan non formal yang berada di bawah pengelolaan pemerintah (Sanggar Kegiatan Belajar/SKB Negeri)
- 6) Arah kebijakan untuk strategi yang keenam adalah :
- a) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
 - b) Menyediakan, melakukan diseminasi dokumen kurikulum muatan lokal
 - c) Memaksimalkan dan monitoring izin operasional sekolah yang sudah kadaluwarsa
 - d) Mempermudah urusan/proses perizinan pendirian sekolah
 - e) Pemerataan guru ke sekolah-sekolah yang tertinggal dalam pencapaian SNP-nya
- 7) Arah kebijakan untuk strategi yang ketujuh adalah :
- a) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran berbasis SOP

- b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur sesuai standar beban kerja
- c) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur
- d) Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan program kegiatan
- e) Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan

2. Urusan Kebudayaan

a. Tujuan

Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 dalam urusan Kebudayaan adalah Meningkatkan Pelestarian dan pengelolaan kekayaan serta keragaman nilai budaya

b. Sasaran

Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya

c. Strategi

Meningkatkan pembinaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan

d. Arah Kebijakan

- 1) Melakukan penetapan cagar budaya dengan membentuk Tim Ahli Cagar Budaya bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
- 2) Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia dan Pranata Kebudayaan termasuk terhadap sanggar-sanggar/kelompok kesenian
- 3) Fasilitasi adat istiadat dan tradisi
- 4) Pengembangan cagar budaya dan situs

Kemungkinan diperlukan juga langkah-langkah kebijakan khusus terkait dengan pengelolaan urusan pendidikan dan kebudayaan, antara lain :

1. Penyelenggaraan pembinaan kesiswaan, kegiatan lomba-lomba akademik dan penjurangan bakat akademik siswa berprestasi pada pendidikan dasar;
2. Penyediaan dukungan yang nyata terhadap peningkatan prestasi akademik peserta didik;
3. Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kelembagaan bagi sekolah/madrasah;
4. Penyediaan dukungan terhadap teknologi informasi pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan pelayanan pendidikan dasar;
5. Penyediaan dukungan buku-buku pelajaran dan buku-buku kepustakaan sebagai sumber belajar siswa dan referensi guru dalam rangka peningkatan mutu, kecerdasan dan daya saing pendidikan;
6. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan dasar yang berkualitas dengan mendukung pemenuhan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan serta standar minimal pendidikan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyediaan dukungan terhadap pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan keterlaksanaan akreditasi sekolah
8. Peningkatan layanan pendidikan luar biasa/pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus:
 - a) Penyediaan kelas/sekolah berkebutuhan khusus bagi anak yang memiliki keterbelakangan, kecerdasan dan bakat istimewa;
 - b) Penyediaan pendidikan layanan khusus bagi anak di daerah terpencil, bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu secara ekonomi;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa/pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - d) Penyediaan alat peraga, alat praktik serta buku-buku pendukung bagi pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - e) Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan penyusunan kurikulum khusus bagi pendidikan luar biasa/pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
9. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik:

Melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) bagi peserta didik kelas 5 dan kelas 9 untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian peserta didik dalam memahami atau menyerap pelajaran yang telah disampaikan dan dalam rangka pencapaian standar proses.

10. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
 - a. Penyediaan dukungan yang nyata kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD baik PNS maupun Non PNS untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraannya;
 - b. Penyediaan dukungan yang nyata kepada pendidik dan tenaga kependidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB baik PNS maupun Non PNS untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraannya;
 - c. Penyediaan dukungan yang nyata bagi tutor pendidikan masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan standar pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraannya.
11. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan dan Pendidikan Non Formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat:
 - a. Penyediaan dukungan yang nyata kepada lembaga kursus dan pelatihan maupun lembaga pendidikan masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan orang dewasa yang bermutu dan setara;
 - b. Penyediaan dukungan yang nyata terhadap pendidikan non formal dan pendidikan informal agar tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. Penyediaan dukungan yang nyata terhadap kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dalam mengikuti pendidikan;
 - d. Penyediaan dukungan yang nyata terhadap pendidikan keaksaraan untuk menyelesaikan penduduk buta aksara murni dalam rangka menuju Kutai Kartanegara Bebas Buta Aksara;
 - e. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana untuk pendidikan masyarakat dan pendidikan non formal yang merata dan berkeadilan;
 - f. Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kelembagaan bagi lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kemasyarakatan;
 - g. Peningkatan pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat miskin dan pengangguran dengan model pendidikan kecakapan hidup yang kreatif dan produktif;
 - h. Pembinaan pendidikan kecakapan hidup yang berkelanjutan bagi orang dewasa.

12. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan:
 - a. Peningkatan akhlakul karimah melalui kegiatan-kegiatan keteladanan, pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila dan pengimplementasian nilai-nilai budaya daerah;
 - b. Penyediaan dukungan yang nyata kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan model pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter dan pendidikan agama;
 - c. Penyediaan dukungan yang nyata kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan nasionalisme;
 - d. Penyediaan dukungan sarana edukasi pembelajaran kecakapan hidup di satuan pendidikan;
 - e. Penyediaan dukungan sarana edukasi pembelajaran berbasis sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan:
 - a. Penguatan regulasi peraturan daerah sebagai payung hukum pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diatur di atasnya untuk pelaksanaan teknis dan operasional di daerah melalui program legislasi daerah yang transparan dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memenuhi standar pelayanan minimal dan standar pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi data dan informasi pendidikan dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan dukungan layanan kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan pendidikan;
 - d. Penguatan manajemen pelayanan pendidikan dengan peningkatan layanan melalui pengembangan teknologi dan informasi.
 - e. Penguatan pengendalian, evaluasi dan pengawasan internal Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel TC-25

NO	TUJUAN	SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,22	9,22	9,23	9,24	9,25	9,26	9,27	9,27
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,59	13,59	13,6	13,61	13,62	13,63	13,64	13,64
		Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Prosentase	77,93%	78,00%	79,31%	79,32%	79,33%	79,34%	79,35%	79,35%
			Angka Partisipasi Murni SD	Prosentase	96,72%	97,01%	97,13%	97,25%	97,37%	97,49%	97,61%	97,61%
			Angka Partisipasi Sekolah SD	Prosentase	100,99%	100,95%	100,90%	100,85%	100,81%	100,80%	100,70%	100,70%
			Angka Putus Sekolah SD	orang	194	194	465	398	278	201	123	123
			Angka Partisipasi Kasar SMP	Prosentase	100,97%	100,80%	100,76%	100,55%	100,34%	100,24%	100,03%	100,03%
			Angka Partisipasi Murni SMP	Prosentase	77,79%	77,80%	77,91%	78,03%	78,15%	78,27%	78,39%	78,39%
			Angka Partisipasi Sekolah SMP	Prosentase	100,22	100%	100,21%	100,20%	100,19%	100,18%	100,17%	100,17%
			Angka Putus Sekolah SMP	orang	498	450	418	338	258	198	118	118

			Angka Melek Huruf	Prosentase	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	99,99
	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kekayaan serta keragaman nilai budaya		Indeks Kebudayaan	Prosentase	0	85,00%	88	89,5	91	92,5	94	78,67
		Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya	Cakupan warisan budaya yang dilestarikan	Prosentase		85,00%	88	89,5	91	92,5	94	94

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, maka perlu dirumuskan Strategi dan Kebijakan strategis yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dan tercapainya misi.

Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Penyelenggaran Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan kualitas program PAUD, Wajib belajar 9 tahun meliputi layanan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar yang bermutu, relevan dan memperhatikan kearifan lokal.;
3. Pelestarian serta pengelolaan adat dan budaya daerah dengan mengembangkan nilai-nilai Kebudayaan daerah.

a. Kebijakan

Arah kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkatoran berbasis SOP;
2. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Aparatur sesuai standard beban kerja;
3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur;
4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan program kegiatan;
5. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan;
6. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan dan Pendidikan Non Formal yang setara, bermutu dan relevan;
7. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan
8. Peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memenuhi standar pelayanan minimal dan standar pengelolaan pendidikan;
9. Penguatan pelestarian Kekayaan budaya daerah;
10. Peningkatan Pengelolaan keragaman budaya;

11. Pengembangan nilai budaya;
12. Penguatan pelestarian Kekayaan budaya daerah.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tabel TC-26

VISI (RPJMD)	:	"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"		
MISI (RPJMD)*	:	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan		Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa;	Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang belum tersedia
				Pemenuhan akses pendidikan bagi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar bagi siswa tidak mampu
				Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
			Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatnya prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;	Melakukan Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal
				Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui DIKLAT, PPG dan Pelatihan Guru
				Merevitalisasi Kelompok Kerja Guru Jenjang Pendidikan PAUD dalam rangka peningkatan mutu tenaga pendidik.
				Pemberian beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1

				Penyediaan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah bagi Pendidikan Anak Usia Dini
			Meningkatkan kualitas Pendidikan Dasar yang bermutu, relevan dan memperhatikan kearifan lokal.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang belum tersedia
				Merevitalisasi Kelompok Kerja Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dalam rangka peningkatan mutu tenaga pendidik.
				Pemberian beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1
				Penyediaan Alokasi Bantuan Operasional Kabupaten jenjang pendidikan SD
				Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
				Pemenuhan SPM Kebutuhan belajar bagi siswa tidak mampu
			Meningkatkan kualitas Pendidikan Menengah Pertama yang bermutu, relevan dan memperhatikan kearifan lokal.	Merevitalisasi Kelompok Kerja Guru Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam rangka peningkatan mutu tenaga pendidik.
				Mengusulkan pemberian beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1
				Penambahan guru Bimbingan Konseling (BK)
				Penyediaan Alokasi Bantuan Operasional Kabupaten jenjang pendidikan SMP
				Pemenuhan SPM Kebutuhan belajar bagi siswa tidak mampu

			Penambahan lembaga pendidikan non formal	Memberikan kemudahan dalam perizinan pendirian untuk lembaga pendidikan non formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM)
				Menambah lembaga pendidikan non formal yang berada dibawah pemerindah daerah (SKB Negeri)
			Peningkatan mutu layanan pendidikan non formal kesetaraan	Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
				Menyediakan, mendiseminasikan dokumen kurikulum muatan lokal.
				Memaksimalkan, dan monitoring izin operasional sekolah yang sudah kadaluwarsa
				Mempermudah urusan/proses perizinan pendirian sekolah
				Pemerataan guru ke sekolah sekolah yang tertinggal Standar Nasional Pendidikan (SNP)
			Meningkatkan penyelenggaraan penunjang urusan perangkat daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran berbasis SOP
				Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Aparatur sesuai standard beban kerja
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur
				Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan program kegiatan
				Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan

Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kekayaan serta keragaman nilai budaya		Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya	Meningkatkan pembinaan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan	Melakukan penetapan cagar budaya dengan membentuk Tim Ahli Cagar Budaya bekerjasama dengan BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya)
				Pembinaan terhadap SDM dan Pranata Kebudayaan termasuk terhadap sanggar sangar/kelompok kesenian
				Fasilitasi adat istiadat dan tradisi
				Pengembangan cagar budaya dan situs

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berisikan uraian dan penjelasan yang bersifat khusus dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dituangkan dalam bentuk table matriks Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Objek Keterangan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
												2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp			Tar get	Rp	
1	2	3					4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	X	X	X	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,01	67	906.873.197.156	69	692.860.654.640	71	692.860.654.640	73	692.860.654.640	75	692.860.654.640	75	3.678.315.815.716		
		X	X	X	0	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	750.000.000	8	750.000.000	8	750.000.000	8	750.000.000	8	750.000.000	40	3.750.000.000		
		X	X	X	0	1	2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen	Dokumen	1	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	10	1.750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong
		X	X	X	0	1	2,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000		
		X	X	X	0	1	2,03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000		

		X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	15	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong
		X	X	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong
		X	X	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1. Dokumen 2. Orang/Bulan	599	71966	801.595.208.816	71894	801.445.208.816	71894	801.445.208.816	71894	801.445.208.816	71894	801.445.208.816	359542	4.007.376.044.080		
		X	X	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	71892	71892	800.845.208.816	71892	800.845.208.816	71892	800.845.208.816	71892	800.845.208.816	71892	800.845.208.816	359460	4.004.226.044.080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong
		X	X	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Dokumen	72	72	150.000.000									72	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		1	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	dokumen	1	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	5	2.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	Dokumen	928	964	300.000.000	964	300.000.000	964	300.000.000	964	300.000.000	964	300.000.000	4820	1.500.000.000		

		X	X	0	2	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Laporan	36	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	180	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Dokumen	1	928	200.000.000	928	200.000.000	928	200.000.000	928	200.000.000	928	200.000.000	4640	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	orang	139	511	750.000.000	771	750.000.000	771	750.000.000	771	750.000.000	771	750.000.000	3595	3.750.000.000		
		X	X	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	900	300	150.000.000	560	150.000.000	560	150.000.000	560	150.000.000	560	150.000.000	2540	750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	Jumlah ASN yang dilakukan pembinaan	orang	64	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	350	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		1	Jumlah Dokumen	orang	43	43	150.000.000	43	150.000.000	43	150.000.000	43	150.000.000	43	150.000.000	215	750.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1	Jumlah Peserta yang dilatih	Peserta	187	98	250.000.000	98	250.000.000	98	250.000.000	98	250.000.000	98	250.000.000	490	1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	Buah	25.908	21097	1.326.509.976	23708	1.665.000.000	23708	1.665.000.000	23708	1.665.000.000	23708	1.665.000.000	115929	7.986.509.976		

		X	X	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	buah	25	25	50.00 0.000	25	50.00 0.000	25	50.00 0.000	25	50.00 0.000	25	50.00 0.000	125	250.0 00.00 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	buah	154	154	411.5 09.97 6	165	450.0 00.00 0	165	450.0 00.00 0	165	450.0 00.00 0	165	450.0 00.00 0	814	2.211. 509.9 76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	Buah	4500	450 0	300.0 00.00 0	450 0	300.0 00.00 0	450 0	300.0 00.00 0	450 0	300.0 00.00 0	450 0	300.0 00.00 0	225 00	1.500. 000.0 00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	Lembar	15500	155 00	75.00 0.000	155 00	75.00 0.000	155 00	75.00 0.000	155 00	75.00 0.000	155 00	75.00 0.000	775 00	375.0 00.00 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		1	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	Media	700	700	90.00 0.000	700	90.00 0.000	700	90.00 0.000	700	90.00 0.000	700	90.00 0.000	350 0	450.0 00.00 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	100			100	100.0 00.00 0	100	100.0 00.00 0	100	100.0 00.00 0	100	100.0 00.00 0	400	400.0 00.00 0		
		X	X	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	orang	50	218	400.0 00.00 0	218	400.0 00.00 0	218	400.0 00.00 0	218	400.0 00.00 0	218	400.0 00.00 0	109 0	2.000. 000.0 00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah penataan arsip keuangan	buah	2000			250 0	200.0 00.00 0	250 0	200.0 00.00 0	250 0	200.0 00.00 0	250 0	200.0 00.00 0	100 00	800.0 00.00 0		
		X	X	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	unit	28	20	290.0 00.00 0	30	390.0 00.00 0	30	390.0 00.00 0	30	390.0 00.00 0	30	390.0 00.00 0	140	1.850. 000.0 00		

		X	X	0	2 0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	unit	10	20	290.0 00.00 0	30	390.0 00.00 0	30	390.0 00.00 0	30	390.0 00.00 0	30	390.0 00.00 0	140	1.850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	Bulan/Orang	73.848	6135	101.136.478.364	6335	104.736.478.364	6335	104.736.478.364	6335	104.736.478.364	6335	104.736.478.364	31475	520.082.391.820		
		X	X	0	2 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	Bulan / Rekening	4	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	20	6.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2 0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	Unit	150			200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	800	400.000.000		
		X	X	0	2 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	Jumlah Pembayaran bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai Administrasi dan Pegawai Teknis Lainnya	Orang	6131	6131	99.886.478.364	6131	103.386.478.364	6131	103.386.478.364	6131	103.386.478.364	6131	103.386.478.364	30655	513.432.391.820	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	Unit	582	528	725.000.000	528	725.000.000	528	725.000.000	528	725.000.000	528	725.000.000	2640	3.625.000.000		

		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	Buah	10	10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	50	625.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	Unit	480	480	75.000.000	480	75.000.000	480	75.000.000	480	75.000.000	480	75.000.000	2400	375.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	Unit	90	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	150	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	Sistem	3	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15	125.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		X	X	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kepada pelayanan masyarakat	Unit	16	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	25	1.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	1	0	0	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	Presentase	84,43	85,86	105.792.950.000	87	88,43	331.232.036.900	89,71	325.307.430.600	90,71	360.098.763.800	90,71	1.446.800.276.800			
									Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Presentase	83,43	84,86		86			87,43				88,71		89,71	89,71	

									Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Paud (Angka Indeks Max 7)	Presentase	76,92	78,72		80,6		82,02		83,02		83,92		83,92			
									Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetraan (Angka Indeks Max 7)	Presentase	62,28	64,08		65,98		67,38		68,38		69,28		69,28			
									Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	orang		3000		3000		3000		3000		3000		15000			
I		1	01	02	201		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase	86,00%	88,86%		90,38%		91,79%		92,94%		93,89%		93,89%			
									Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase	81,71%	84,57%	56.685.200.000	86,09%	58.670.200.000	87,50%	58.670.200.000	88,65%	58.670.200.000	89,60%	58.820.200.000	89,60%	291.516.000.000		
									Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase	88,29%	91,15%		92,67%		94,08%		95,23%		96,18%		96,18%			
									Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase	78,71%	81,57%		83,09%		84,50%		85,65%		86,60%		86,60%			

		1	0	0	2	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penyediaan Ruang Toilet Beserta Sanitasinya	1	Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	unit		38	2.600.000.000	5	1.125.000.000	5	1.125.000.000	5	1.125.000.000	5	1.125.000.000	58	7.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	0	0	2	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		1	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	ruang	2356	9	500.000.000	5	1.600.000.000	5	1.600.000.000	5	1.600.000.000	5	1.600.000.000	29	6.900.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	0	0	2	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehab pergantian atap seng SDN 011 Muara Badak	1	Jumlah Ruang kantor yang direhab	ruang		3	200.000.000									3	200.000.000		
		1	0	0	2	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah		1	Jumlah rumah dinas/mess sekolah yang direhab	rumah		4	1.200.000.000									4	1.200.000.000		
		1	0	0	2	0	Pengadaan Mebel Sekolah	Meubel sekolah SD	1	Tersedianya meubel sekolah	set	86325	1764	3.000.000.000	1500	2.550.000.000	1500	2.550.000.000	1500	2.550.000.000	1500	2.550.000.000	7764	13.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	0	0	2	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Program Beasiswa KUKAR IDAMAN	1	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa	Siswa	0	2000	2.400.000.000	2000	950.000.000	2000	950.000.000	2000	950.000.000	2000	950.000.000	10000	6.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong
		1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Fasilitasi Penyelenggaraan Asessmen Kompetensi Minimum (AKM)Tingkat Sekolah Dasar						300.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	0	0	2	0			1	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah	Siswa	6500	1300	200.000.000	1500	250.000.000	1500	250.000.000	1500	250.000.000	1500	250.000.000	7300	1.200.000.000		

[illegible]

		1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	550.000.000										750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		3.550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
									1	Jumlah Siswa SD yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	Siswa	1820	364	350.000.000	364	400.000.000	364	400.000.000	364	400.000.000	364	400.000.000	1820	1.950.000.000					
								Penguatan Gugus Depan SD		Jumlah Sekolah yang mengikuti penguatan pendidikan	Sekolah	115			25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	100	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara			
								Lomba Baca Tulis Al-Qur'an tingkat SD	1	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba GEMA	Siswa	-	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	500	1.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong			
		1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendampingan Pengadaan Guru PPPK SD		Jumlah Guru yang Menjadi PPPK SD	Orang	0	0		160	240.000.000	160	240.000.000	160	240.000.000	160	240.000.000	640	960.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong			
		1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Beasiswa Idaman Kualifikasi S-1 Guru SD	2.595.000.000										2.255.000.000		2.255.000.000		2.255.000.000		2.255.000.000		11.615.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong
									1	Jumlah Guru SD Yang Mendapatkan Beasiswa Kualifikasi S-1	Orang	0	390	2.000.000.000	150	800.000.000	150	800.000.000	150	800.000.000	150	800.000.000	990	5.200.000.000					
								Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah SD	1	Jumlah Guru dan Plt. Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat (NUKS)	Orang	300	30	350.000.000	60	700.000.000	60	700.000.000	60	700.000.000	60	700.000.000	270	3.150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong			
								Pendidikan Profesi Guru SD	1	Jumlah Guru SD yang memiliki Sertifikat Pendidik	Orang	2384	34	245.000.000	90	605.000.000	90	605.000.000	90	605.000.000	90	605.000.000	394	2.665.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong			

								Pelatihan Guru Inklusif	Jumlah Guru SD yang memiliki keterampilan guru inklusif	Orang	50	0		30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	120	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong
		1	01	02	2,01	28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Lomba Manajemen Mutu Sekolah Dasar				-		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
									Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	Sekolah	135	0		30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	120	600.000.000		
								Lomba Sekolah Sehat dan Adiwiyata Tingkat Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	Sekolah	150	0		40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	160	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	01	02	2,01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Bantuan operasional sekolah Kabupaten (BOSKAB) jenjang Sekolah Dasar	1	Jumlah penerima BOS Kabupaten	Siswa	94116	94116	40.115.200.000	94116	40.115.200.000	94116	40.115.200.000	94116	40.115.200.000	470580	200.576.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	01	02	2,01	30		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sosialisasi, Verifikasi dan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD						550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara

									1	Jumlah sekolah dalam mempertanggungja wabkan Dana BOS SD	Sekolah	472	472	350.000.000	472	350.000.000	472	350.000.000	472	350.000.000	472	2360	1.750.000.000			
								Pendampingan danMonitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	1	Jumlah sekolah dalam mempertanggungja wabkan dana BOS SD	Sekolah	472	472	200.000.000	472	200.000.000	472	200.000.000	472	200.000.000	472	2360	1.150.000.000			
		1	01	02	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP	persentase	83,43 %	86,29 %	34.922.600.000	87,81 %	38.442.600.000	89,22 %	38.630.100.000	90,37 %	38.655.100.000	91,32 %	38.680.100.000	91,32 %	189.330.500.000		
										Standar isi Pendidikan SMP	persentase	79,00 %	81,86 %		83,38 %		84,79 %		85,94 %		86,89 %					
										Standar proses Pendidikan SMP	persentase	86,00 %	88,86 %		90,38 %		91,79 %		92,94 %		93,89 %					
										Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP	persentase	73,86 %	76,72 %		78,24 %		79,65 %		80,80 %		81,75 %					
										Standar pengelolaan Pendidikan SMP	persentase	86,57 %	89,43 %		90,95 %		92,36 %		93,51 %		94,46 %					
										Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	persentase	69,86 %	72,72 %		74,24 %		75,65 %		76,80 %		77,75 %					

										1	Jumlah Nilai Rata-Rata KKM Peserta Didik Kelas VIII	Peserta	9579	970 0	200.0 00.00 0	970 0	200.0 00.00 0	970 0	200.0 00.00 0	970 0	200.0 00.00 0	970 0	200.0 00.00 0	485 00	1.000. 000.0 00						
											Tes Daya Serap Asesmen Nasional Jenjang SMP		Jumlah Kelulusan Peserta Didik Jenjang SMP	Peserta	9579	0	-	970 0	350.0 00.00 0	970 0	350.0 00.00 0	970 0	350.0 00.00 0	970 0	350.0 00.00 0	388 00	1.400. 000.0 00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara		
											Pelaksanaan Gerakan Literasi Jenjang SMP		Peningkatan literasi Membaca Peserta Didik Jenjang SMP	Sekolah		0	-	145	250.0 00.00 0	145	250.0 00.00 0	145	250.0 00.00 0	145	250.0 00.00 0	580	1.000. 000.0 00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara		
											Bimtek Penyusunan Perangkat Pembelajaran (Blended Learning) Jenjang SMP		Jumlah perangkat pembelajaran guru pada masing-masing mata pelajaran Jenjang SMP	orang		0	-	160 0	300.0 00.00 0	160 0	300.0 00.00 0	160 0	300.0 00.00 0	160 0	300.0 00.00 0	640 0	1.200. 000.0 00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara		
											Fasilitasi Portal Pembelajaran Asesmen dan Manajemen Berbasis sekolah "KUKAR PINTAR" Jenjang SMP		1		Aplikasi AKM Kelas, Jumlah Video Pembelajaran dan Manajemen Berbasis Sekolah yang Baik	Sistem		1	100.0 00.00 0	1	175.0 00.00 0	1	175.0 00.00 0	1	175.0 00.00 0	1	175.0 00.00 0	5	800.0 00.00 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara

		1	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Online Tingkat SMP	250.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Se- Kab. Kukar										
								1	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan PPDB Berbasis Online	Sekolah	81	85	250.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	285	650.000.000					
									Jumlah Peserta Didik yang Memiliki Kartu Indonesia Pintar	Siswa	7.851	0	-	8.176	50.000.000	8.176	50.000.000	8.176	50.000.000	8.176	50.000.000	32704	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Se- Kab. Kukar	
		1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Siswa SMP	600.000.000	975.000.000	1.000.000.000	1.025.000.000	1.050.000.000	4.650.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten, Provinsi & Nasional										
								1	Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	Siswa	0	200	200.000.000	250	300.000.000	300	325.000.000	350	350.000.000	400	375.000.000	1500	1.550.000.000			
		1	01	02	2,02	38		Kompetisi Sains Nasional (KSN) Siswa SMP	1	Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	Siswa	173	150	100.000.000	150	125.000.000	150	125.000.000	150	125.000.000	150	125.000.000	750	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten, Provinsi & Nasional

								Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Siswa SMP	1	Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	Siswa	50	80	100.000.000	80	125.000.000	80	125.000.000	80	125.000.000	80	125.000.000	400	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten, Provinsi & Nasional
								Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa SMP	1	Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	Siswa	75	60	100.000.000	60	125.000.000	60	125.000.000	60	125.000.000	60	125.000.000	300	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten, Provinsi & Nasional
								Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia (GSI) Tingkat SMP	1	Jumlah Peserta yang Mengikuti Lomba	Sekolah	15	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten, Provinsi & Nasional
								Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat Siswa SMP		Jumlah Peserta yang Mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter	Siswa	267		-	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	800	800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten
		1	01	02	202	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Beasiswa Idaman untuk Kualifikasi 1000 Guru (Kualifikasi S1)						1.645.000.000		2.470.000.000		2.470.000.000		2.470.000.000		2.470.000.000		11.525.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kutai Kartanegara
									1	Jumlah Guru SMP yang memiliki Kualifikasi Sarjana (S1)	Guru		110	600.000.000	110	600.000.000	110	600.000.000	110	600.000.000	110	600.000.000	550	3.000.000.000		
								Pelatihan Guru Agama SMP		Jumlah Guru Agama Islam yang memiliki Kompetensi Dalam Pelaksanaan GEMA	orang			-	50	275.000.000	50	275.000.000	50	275.000.000	50	275.000.000	200	1.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kutai Kartanegara
								Sertifikasi Tenaga Laboratorium SMP	1	Jumlah Tenaga Laboran SMP	Orang		30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	150	1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kutai Kartanegara
								Sertifikasi Tenaga Perpustakaan SMP	1	Jumlah Tenaga Pustakawan SMP	Orang		30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	150	1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kutai Kartanegara

									Pelatihan Tenaga Operator SMP		Jumlah Tenaga Operator SMP	Orang			-	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	120	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kutai Kartanegara
									Pelatihan Guru Inklusif		Jumlah Guru SMP yang memiliki keterampilan guru inklusif	orang			-	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	40	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kutai Kartanegara
									Pendidikan Pofesi Guru SMP	1	Jumlah Guru SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik	orang		15	245.000.000	15	245.000.000	15	245.000.000	15	245.000.000	15	245.000.000	75	1.225.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kutai Kartanegara
									Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah SMP	1	Jumlah Kepala SMP yang mengikuti seleksi Kepsek Unggulan	orang		25	300.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	105	1.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kutai Kartanegara
									Diklat Calon Kepala Sekolah (Pelatihan dan Pemberkasan) SMP		Jumlah Kepala SMP yang mengikuti Diklat Calon Kepsek Unggulan	orang			-	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	120	1.400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kutai Kartanegara
		1	01	02	2,02	41		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Akreditasi SMP		Jumlah sekolah yang dibina	Sekolah			-	102	150.000.000	102	150.000.000	102	150.000.000	102	150.000.000	408	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	01	02	2,02	42		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten	1	Jumlah penerima BOS Kabupaten	Siswa	40599	41000	26.537.600.000	41000	26.537.600.000	41000	26.537.600.000	41000	26.537.600.000	41000	26.537.600.000	205000	132.688.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	01	02	2,02	43		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP/MTs						300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
										1	Jumlah sekolah dalam mempertanggungja wabkan Dana BOS SMP	sekolah	195	195	300.000.000	195	250.000.000	195	250.000.000	195	250.000.000	195	250.000.000	975	1.300.000.000		

								Sinkronisasi Laporan Pertanggungja waban dan Implementasi Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP/Mts		Peningkatan kualitas pengelolaan dana BOS SMP/MTs	sekolah	195	0	-	195	50.00 0.000	195	50.00 0.000	195	50.00 0.000	195	50.00 0.000	780	200.0 00.00 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	0 1	0 2	2 / 0 3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD	Persentase	82,89 %	85, 75 %		87, 27 %		88, 68 %		89, 83 %		90, 78 %		90, 78 %				
									Standar Isi Pendidikan PAUD	Persentase	84,64 %	87, 50 %		89, 02 %		90, 43 %		91, 58 %		92, 53 %		92, 53 %				
									Standar Proses Pendidikan PAUD	Persentase	91,55 %	94, 41 %		95, 93 %		97, 34 %		98, 49 %		99, 44 %		99, 44 %				
									Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Persentase	36,90 %	39, 76 %	11.55 8.750 .000	41, 28 %	17.04 6.750 .000	42, 69 %	17.30 4.250 .000	43, 84 %	17.30 4.250 .000	44, 79 %	17.17 9.250 .000	44, 79 %	80.39 3.250 .000			
									Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD	Persentase	67,04 %	69, 90 %		71, 42 %		72, 83 %		73, 98 %		74, 93 %		74, 93 %				
									Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD	Persentase	85,91 %	88, 77 %		90, 29 %		91, 70 %		92, 85 %		93, 80 %		93, 80 %				

[illegible]

								Pendampingan Program SIGAP dan Program PAUD Kukar Berseri		Jumlah Peserta	peserta		0	-	125	200.000.000	125	200.000.000	125	200.000.000	125	200.000.000	500	800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
								Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Jumlah Peserta	peserta		0	-	125	200.000.000	125	200.000.000	125	200.000.000	125	200.000.000	500	800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
								Pelatihan Kurikulum PAUD		Jumlah Peserta	peserta		0	-	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	800	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
								Pelatihan Kurikulum PAUD Inklusi		Jumlah Peserta	peserta		0	-	60	150.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000	240	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
								Pendidikan Parenting	1	Jumlah Masyarakat yang mengikuti parenting	orang		100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	500	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten, Provinsi & Nasional
								Pekan Olahraga Seni PAUD		Jumlah Peserta	Siswa		0	-	564	250.000.000	564	250.000.000	564	250.000.000	564	250.000.000	2256	1.000.000.000		
		1	01	02	203	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Pendampingan Pendidikan Keluarga		200.000.0000400.000.0000400.000.0000400.000.0000400.000.00001.800.000.000															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Se- Kab. Kukar
									1	Jumlah orang tua dari keluarga	Peserta		200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	1000	1.000.000.000		
								Penguatan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini		Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti penguatan pendidikan karakter	Peserta		0	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	400	800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Se- Kab. Kukar

		1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Beasiswa Idaman untuk Kualifikasi 1000 Guru (Kualifikasi S1)				2.920.000.000		2.475.000.000		2.475.000.000		2.475.000.000		2.475.000.000		12.820.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong		
									1	Jumlah Guru PAUD yang memiliki Kualifikasi Sarjana (S1)	Orang		500	2.550.000.000	441	2.205.000.000	441	2.205.000.000	441	2.205.000.000	441	2.205.000.000	2264	11.370.000.000		
								Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah	1	Jumlah Guru dan Plt. Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat (NUKS)	Orang		20	200.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	40	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong
								Pendidikan Profesi Guru	1	Jumlah Guru PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik	Orang		10	170.000.000	10	170.000.000	10	170.000.000	10	170.000.000	10	170.000.000	50	850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong
		1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pemetaan Mutu Lembaga PAUD		200.000.000200.000.000200.000.000200.000.000											800.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara			
										Jumlah lembaga yang dibina	Lembaga		0	-	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	200	400.000.000		
								Akreditasi Lembaga PAUD		Jumlah lembaga yang diakreditasi	Lembaga		0	-	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	200	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten PAUD	1	Jumlah bantuan operasional sekolah kabupaten	siswa	19404	19447	6.438.750.000	19447	6.438.750.000	19447	6.438.750.000	19447	6.438.750.000	19447	6.438.750.000	97235	32.193.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara

		1	01	02	203	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Sosialisasi, Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Jumlah lembaga yang dilakukan pendampingan dalam pengelolaan bantuan operasional	PAUD	564	564	250.000.000	564	250.000.000	564	250.000.000	564	250.000.000	564	250.000.000	2820	1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	01	02			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			Angka Melek Huruf	persentase	99,94	99,95	2.626.400.000	99,96	8.963.891.460	99,97	9.213.891.460	99,98	9.463.891.460	99,99	37.713.891.460	99,99	67.981.965.840		
									Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	persentase	61,78 %	64,64 %	66,16 %		67,57 %		68,72 %		69,67 %		69,67 %					
									Standar Isi Pendidikan Kesetaraan	persentase	65,68 %	68,54 %	70,06 %		71,47 %		72,62 %		73,57 %		73,57 %					
									Standar Proses Pendidikan Kesetaraan	persentase	65,64 %	68,50 %	70,02 %		71,43 %		72,58 %		73,53 %		73,53 %					
									Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan	persentase	58,59 %	61,45 %	62,97 %		64,38 %		65,53 %		66,48 %		66,48 %					
									Standar Sarana Prasarana Pendidikan Kesetaraan	persentase	60,35 %	63,21 %	64,73 %		66,14 %		67,29 %		68,24 %		68,24 %					
									Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	persentase	60,64 %	63,50 %	65,02 %		66,43 %		67,58 %		68,53 %		68,53 %					

									1	jumlah siswa yang mengikuti ujian	orang	500	500	150.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	4500	1.350.000.000		
								Bimbingan Teknis Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan		Jumlah peserta yang dibina	Lembaga			-	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	100	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
								Pelatihan Pengelola Kursus dan Pelatihan		Jumlah peserta yang dibina	orang		0	-	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	200	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
								Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)		Jumlah peserta yang dibina	orang		0	-	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	2000	2.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
								Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C		Jumlah peserta yang dibina	orang	200		200	150.000.000	200	150.000.000	200	150.000.000	200	150.000.000	800	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	
								Pemberantasan Buta Aksara	1	Jumlah peserta yang dibina	orang	270	300	200.000.000	600	500.000.000	600	500.000.000	600	500.000.000	600	500.000.000	2700	2.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
								Bimbingan Pendidikan Keaksaraan		Jumlah peserta yang dibina	orang		0	-	60	250.000.000	60	250.000.000	60	250.000.000	60	250.000.000	240	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		1	01	02	204	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Bimbingan Teknis Manajemen Mutu SPNF-SKB dan PKBM						-		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		2.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara

									Jumlah peserta yang dibina	Lembaga		0	-	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	160	800.000.000			
								Pelatihan Kecakapan Hidup (Life Skill) pada Masyarakat	Jumlah peserta yang dibina	orang		0	-	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	200	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	
								Monitoring dan Evaluasi Progarman Keaksaraan Fungsional (KF)	Jumlah peserta yang dimonev	orang		0	-	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	120	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	
		1	01	02	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Fasilitasi Pengembangan PNFI	Jumlah peserta yang dibina	Lembaga		0	-	100	237.491.460	100	237.491.460	100	237.491.460	100	237.491.460	400	949.965.840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	
		1	01	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Pendidikan Non Formal dan Informal	1	Jumlah bantuan operasional sekolah kabupaten	orang	2574	1.936.400.000	2574	1.936.400.000	2574	1.936.400.000	2574	1.936.400.000	2574	1.936.400.000	12870	9.682.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten	
		1	01	02	2,04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sosialisasi, Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi BOP Kesetaraan	1	Jumlah lembaga yang dilakukan pendampingan dalam pengelolaan bantuan operasional	lembaga	50	100.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	450	900.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten	
		1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			Presentase Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Muatan Lokal (Mulok)	Presentase	0	10%	200.000.000	50%	650.000.000	100	650.000.000	100%	-	100%	-	100%	1.500.000.000		
		1	01	03	2,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD	dokumen	0	1	200.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	-	1	-	1	1.500.000.000		

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Kartanegara Thn. 2021-2026

		1	0	0			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Presentase terpenuhinya jumlah guru	Persent ase	85%	87 %	-	90 %	-	92 %	-	95 %	-	97 %	-	97 %	0		
		1	0	0	2		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Keset araan			Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD	rasio	1 : 12	1 : 12		1 : 12		1 : 15		1 : 15		1 : 15		1 : 15	0		
		1	0	0	0					Rasio Guru dengan Peserta didik SD	rasio	1 : 16	1 : 18	-	1 : 20	-	1 : 21	-	1 : 23	-	1 : 24	-	1 : 24			
										Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	rasio	1 : 16	1 : 18		1 : 20		1 : 23		1 : 24		1 : 26		1 : 26			
		1	0	0	2	0	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetara an	Penyusunan dokumen perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan PNFI		Jumlah dokumen analisis peta mutu dan jumlah guru yang dihasilkan	dokumen	0	0	-	4	40.00 0.000	4	40.00 0.000	4	40.00 0.000	4	40.00 0.000	16	160.0 00.00 0		
		1	0	0	2	0	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetara an	rotasi tempat tugas pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pemerataan kualitas dan kuantitas guru		Jumlah PTK yang ditata	orang	0	0	-	250	150.0 00.00 0	250	150.0 00.00 0	250	150.0 00.00 0	250	150.0 00.00 0	100 0	600.0 00.00 0		

		1	0	0			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			Persentase Satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dan izin operasional	Persentase	100 %	10 0 %	100.0 00.00 0	10 0 %	250.0 00.00 0	10 0 %	250.0 00.00 0	10 0 %	250.0 00.00 0	10 0 %	250.0 00.00 0	10 0 %	1.100 .000. 000		
		1	0	0	2		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	dokumen	50	64	-	64	50.00 0.000	64	50.00 0.000	61	50.00 0.000	60	50.00 0.000	57	200.0 00.00 0		
		1	0	0	2	0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Verifikasi dan validasi usulan pendirian satuan pendidikan dan perpanjangan izin operasional SD dan SMP		Jumlah lembaga yang di verifikasi	lembaga	77		-	28	35.00 0.000	28	35.00 0.000	28	35.00 0.000	28	35.00 0.000	112	140.0 00.00 0		
		1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Monitoring dan pengawasan perijinan SD dan SMP		Jumlah lembaga yang dimonitoring	lembaga	77		-	30	15.00 0.000	30	15.00 0.000	30	15.00 0.000	30	15.00 0.000	120	60.00 0.000		
		1	0	0	2		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	dokumen	95	80	100.0 00.00 0	100	200.0 00.00 0	100	200.0 00.00 0	100	200.0 00.00 0	100	200.0 00.00 0	100	900.0 00.00 0		
		1	0	0	2	0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Verifikasi dan validasi usulan pendirian satuan pendidikan dan perpanjangan izin operasional PAUD dan PNFI	1	Jumlah lembaga yang di verifikasi	lembaga	609	100	100.0 00.00 0	150	100.0 00.00 0	150	100.0 00.00 0	150	100.0 00.00 0	150	100.0 00.00 0	700	500.0 00.00 0		

		1	0 1	0 5	2 / 0 2	0 2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Monitoring dan pengawasan perizinan PAUD dan PNFI		Jumlah lembaga yang dimonitoring	lembaga	609	0	-	150	100.0 00.00 0	150	100.0 00.00 0	150	100.0 00.00 0	150	100.0 00.00 0	600	400.0 00.00 0		
		1	0 1	0 6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			Cakupan sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai mata pelajaran	Persentase	0	0	-	50 %	-	70 %	-	90 %	-	100 %	-	100 %	0		
										Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SD	sekolah	0	80		160		200		240		300		300			
		1	0 1	0 6	2 / 0 1		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksanannya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SMP	sekolah	0	30	-	60	-	90	0%	106	-	106	-	106	0		
										Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	0	110 0		220 0		290 0		346 0		406 0		406 0			
										Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah	kali kegiatan	0	5		5		5		5		5		5			
		1	0 1	0 6	2 / 0 1	0 1	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Workshop penyusunan kamus Kamus Bahasa Daerah		Jumlah dokumen yang dihasilkan	Eksemplar	0	0	-	100 0	100.0 00.00 0	100 0	100.0 00.00 0	100 0	100.0 00.00 0	100 0	100.0 00.00 0	400 0	40000 0000		

		1	0 1	0 6	2 , 0 1	0 2	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan vitalisasi, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah		Jumlah sekolah yang mengangkat bahasa dan sastra daerah sebagai mata pelajaran	Kegiatan		-	-									0	0		
		1	0 1	0 6	2 , 0 1	0 3	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Publikasi bahasa dan sastra daerah		Jumlah kegiatan publikasi	Kegiatan		-	-	2	200.0 00.00 0	2	200.0 00.00 0	2	200.0 00.00 0	2	200.0 00.00 0	8	80000 0000		
		1	0 1	0 6	2 , 0 1	0 4	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Apresiasi tokoh kebahasaan dan Sastra daerah		Jumlah tokoh yang diberikan penghargaan	orang		-	-	2	20.00 0.000	2	20.00 0.000	2	20.00 0.000	2	20.00 0.000	8	80000 000		
		1	0 1	0 6	2 , 0 1	0 5	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Pengadaan buku cerita rakyat daerah		Jumlah buku yang di distribusikan	Eksempl ar		0	-	300 0	120.0 00.00 0	300 0	120.0 00.00 0	300 0	120.0 00.00 0	300 0	120.0 00.00 0	120 00	48000 0000		
		1	0 1	0 6	2 , 0 1	0 6	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lomba bertutur bahasa daerah dan apresiasi sastra daerah untuk siswa PAUD, SD, SMP dan PNF		Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba	orang		-	-	400	300.0 00.00 0	400	300.0 00.00 0	400	300.0 00.00 0	400	300.0 00.00 0	160 0	12000 00000		
		1	0 1	0 6	2 , 0 1	0 7	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Workshop penyusunan modul dan bahan ajar bahasa Daerah		Jumlah modul dan bahan ajar yang didistribusikan	Eksempl ar		0	-	300 0	120.0 00.00 0	300 0	120.0 00.00 0	300 0	120.0 00.00 0	300 0	120.0 00.00 0	120 00	48000 0000		

Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kekayaan serta keragaman nilai budaya								Indek Kebudayaan	Persentase	85%	88%		89,50%		91%		92,50%		94%		94%				
Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan keragaman warisan budaya								Cakupan warisan budaya yang dilestarikan	Persentase	85%	88%		89,50%		91%		92,50%		94%		94%				
		2	2	0	2			Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	2	10		20		20		30		30		110		14.025.000.000		
							PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	Persentase	100	100		100		100		100		100		100%		14.025.000.000		
		2	2	0	2	2		Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	kegiatan	5	8	4.325.000.000	10	350.000.000	12	4.400.000.000	13	450.000.000	15	4.500.000.000	15	14.025.000.000			

		2	22	02	2,02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelaksanaan Erau Kesultanan	1	Jumlah Tradisi Budaya yang di lindungi,dikembang kan dan dimanfaatkan .	Kegiatan	2	1	4.325.000.000	2	500.000.000	2	4.500.000.00	2	500.000.00	2	4.500.000.00	9	14.325.000.000		
								Bantuan Pakaian adat dayat modang (30 pakaian laki-laki, 10 pakaian perempuan) digunakan			set		1	75.000.000												
								Bantuan Pembinaan dan Pengadaan sarana kesenian tingkilan di desa Kembang Janggut			set		1	100.000.000												
								Bantuan Alat musik kesenian dan sound system Kec. Muara Muntai			set		1	150.000.000												
		2	22	02	2,02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pemdes		Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Dibina	orang		0	-	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	80	1.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Kutai Kartanegara
		2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Presentase Lembaga Seni Budaya Yang Aktif	present ase	50	60%	150.000.000	65%	1.850.000.000	70%	1.950.000.000	75%	2.000.000.000	80%	2.050.000.000	80%	8.000.000.000		

		2	2	0	2		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	kegiatan	5	8	150.000.000	10	1.850.000.000	12	1.950.000.000	13	2.000.000.000	15	2.050.000.000	15	2.350.000.000		
		2	2	0	2	0	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Tersedianya Penggiat/ pelaku kesenian yang berkualitas	Orang	35		-	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	200	1.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong
		2	2	0	2	0	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1	Jumlah pelaku kesenian yang dibina dan mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standar	orang	10	10	150.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	90	1.150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenggarong
		2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Presetase Sejarah lokal yang dilestarikan	persentase	27,78 %	65,23 %		70,48 %	-	72,65 %	-	75,98 %	-	78,67 %	-	78,67 %	-		
		2	2	0	2	0	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	kegiatan	8	8	-	12	100.000.000	14	100.000.000	16	100.000.000	20	100.000.000	20	400.000.000		
		2	2	0	2	0	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah masyarakat yang mengakses data dan informasi sejarah	orang	0	0		30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	120	400.000.000		
		2	2	0			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Cagar Budaya yang dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan)	persentase	100	100 %	250.000.000	100 %	650.000.000	100 %	650.000.000	100 %	650.000.000	100 %	650.000.000	100 %	2.850.000.000		

		2	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			Persentase museum yang dikelola	persent ase	50%	65, 23 %	-	70, 48 %	-	72, 65 %	-	75, 98 %	-	78, 67 %	-	78, 67 %	0		
		2	2	0	2 , 0 1		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	museum	2	2	-	2	400.0 00.00 0	2	400.0 00.00 0	2	400.0 00.00 0	2	400.0 00.00 0	2	16000 00000		
		2	2	0	2 , 0 4	0	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinsos		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia	Titik	2			2	200.0 00.00 0	2	200.0 00.00 0	2	200.0 00.00 0	2	200.0 00.00 0	8	80000 0000		
		2	2	0	2 , 0 1	0	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Dinsos		Jumlah museum yang di revitalisasi	Banguna n/Gedun g	2			2	200.0 00.00 0	2	200.0 00.00 0	2	200.0 00.00 0	2	200.0 00.00 0	8	80000 0000		
JUMLAH KESELURUHAN														1.017 .691. 147.1 56		1.020 .979. 750.1 40		1.031 .992. 691.5 40		1.021 .518. 085.2 40		1.060 .409. 418.4 40		5.152 .591. 092.5 16		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kutai kartanegara tahun 2021-2026

Tabel TC-28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan							
	Indeks Kebudayaan	85,00%	88	89,5	91	92,5	94	94
	Cakupan warisan budaya yang dilestarikan	85,00%	88	89,5	91	92,5	94	94
	Indikator Sasaran							
	Rata-rata lama sekolah	9,22	9,23	9,24	9,25	9,26	9,27	9,27
	Harapan Lama Sekolah	13,59	13,6	13,61	13,62	13,63	13,64	13,64
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	78,00%	79,31%	79,32%	79,33%	79,34%	79,35%	79,35%
	Angka Partisipasi Kasar SD	102%	101,87%	101,09%	100,31%	100,21%	100,01%	100,01%
	Angka Partisipasi Murni SD	97,01%	97,13%	97,25%	97,37%	97,49%	97,61%	97,61%
	Angka Partisipasi Sekolah SD	100,95%	100,90%	100,85%	100,81%	100,80%	100,70%	100,70%
	Angka Putus Sekolah SD	194	465	398	278	201	123	123
	Angka Partisipasi Kasar SMP	100,80%	100,76%	100,55%	100,34%	100,24%	100,03%	100,03%
	Angka Partisipasi Murni SMP	77,80%	77,91%	78,03%	78,15%	78,27%	78,39%	78,39%
	Angka Partisipasi Sekolah SMP	100%	100,21%	100,20%	100,19%	100,18%	100,17%	100,17%
	Angka Putus Sekolah SMP	450	418	338	258	198	118	118
	Angka Melek Huruf	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	99,99
II	INDIKATOR PROGRAM:							
	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63,01	67	69	71	73	75	75
	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	84,43	85,86	87	88,43	89,71	90,71	90,71
	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	83,43	84,86	86	87,43	88,71	89,71	89,71
	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	76,92	78,72	80,6	82,02	83,02	83,92	83,92
	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 100)	62,28	64,08	65,98	67,38	68,38	69,28	69,28
	Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN	0	3000	3000	3000	3000	3000	15000

	Pendidikan Dasar							
	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	0	10	50	100	100	100	100
	Prosentase terpenuhinya jumlah guru	85	87	90	92	95	97	97
	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai mata pelajaran	0	0	50	70	90	100	100
	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	2	10	20	20	30	30	110
	Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Lembaga Seni Budaya yang Aktif	50	60	65	70	75	80	80
	Prosentase Sejarah lokal yang dilestarikan	27,78	65,23	70,48	72,65	75,98	78,67	78,67
	Persentase Cagar Budaya yang Dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan)	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati)	0	0	4,52	9,55	14,57	19,6	19,6
	Persentase Museum yang Dikelola oleh Pemda (2 Museum)	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase museum yang dikelola	50	65,23	70,48	72,65	75,98	78,67	78,67
III	INDIKATOR KEGIATAN:							
	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8	8	8	8	8	8	40
	Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	599	71966	71894	71894	71894	71894	359542
	Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	928	964	964	964	964	964	4820
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	139	511	771	771	771	771	3595
	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	25.908	21097	23708	23708	23708	23708	115929
	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	28	20	30	30	30	30	140
	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	73.848	6135	6335	6335	6335	6335	31475
	Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	582	528	528	528	528	528	2640
	Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar	86,00%	88,86%	90,38%	91,79%	92,94%	93,89%	93,89%
	Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar	81,71%	84,57%	86,09%	87,50%	88,65%	89,60%	89,60%
	Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar	88,29%	91,15%	92,67%	94,08%	95,23%	95,03%	96,18%

	Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	78,71%	81,57%	83,09%	84,50%	85,65%	86,60%	86,60%
	Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	91,29%	94,15%	95,67%	97,08%	98,23%	99,18%	99,18%
	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	69,29%	72,15%	73,67%	75,08%	76,23%	77,18%	77,18%
	Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar	82,14%	85,00%	86,52%	87,93%	89,08%	90,03%	90,03%
	Standar penilaian Pendidikan Sekolah Dasar	79,14%	82,00%	83,52%	84,93%	86,08%	87,03%	87,03%
	Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP	83,43%	86,29%	87,81%	89,22%	90,37%	91,32%	91,32%
	Standar isi Pendidikan SMP	79,00%	81,86%	83,38%	84,79%	85,94%	86,89%	86,89%
	Standar proses Pendidikan SMP	86,00%	88,86%	90,38%	91,79%	92,94%	93,89%	93,89%
	Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP	73,86%	76,72%	78,24%	79,65%	80,80%	81,75%	81,75%
	Standar pengelolaan Pendidikan SMP	86,57%	89,43%	90,95%	92,36%	93,51%	94,46%	94,46%
	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	69,86%	72,72%	74,24%	75,65%	76,80%	77,75%	77,75%
	Standar pembiayaan Pendidikan SMP	80,43%	83,29%	84,81%	86,22%	87,37%	88,32%	88,32%
	Standar penilaian Pendidikan SMP	74,57%	77,43%	78,95%	80,36%	81,51%	82,46%	82,46%
	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD	82,89%	85,75%	87,27%	88,68%	89,83%	90,78%	90,78%
	Standar Isi Pendidikan PAUD	84,64%	87,50%	89,02%	90,43%	91,58%	92,53%	92,53%
	Standar Proses Pendidikan PAUD	91,55%	94,41%	95,93%	97,34%	98,49%	99,44%	99,44%
	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	36,90%	39,76%	41,28%	42,69%	43,84%	44,79%	44,79%
	Standar Sarana Prasarana Pendidikan PAUD	67,04%	69,90%	71,42%	72,83%	73,98%	74,93%	74,93%
	Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD	85,91%	88,77%	90,29%	91,70%	92,85%	93,80%	93,80%
	Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD	76,61%	79,47%	80,99%	82,40%	83,55%	84,50%	84,50%
	Standar Penilaian Pendidikan PAUD	80,21%	83,07%	84,59%	86,00%	87,15%	88,10%	88,10%
	Angka Melek Huruf	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	99,99
	Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	61,78%	64,64%	66,16%	67,57%	68,72%	69,67%	69,67%
	Standar Isi Pendidikan Kesetaraan	65,68%	68,54%	70,06%	71,47%	72,62%	73,57%	73,57%
	Standar Proses Pendidikan Kesetaraan	65,64%	68,50%	70,02%	71,43%	72,58%	73,53%	73,53%
	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan	58,59%	61,45%	62,97%	64,38%	65,53%	66,48%	66,48%
	Standar Sarana Prasarana Pendidikan Kesetaraan	60,35%	63,21%	64,73%	66,14%	67,29%	68,24%	68,24%
	Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	60,64%	63,50%	65,02%	66,43%	67,58%	68,53%	68,53%
	Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan	55,44%	58,30%	59,82%	61,23%	62,38%	63,33%	63,33%

	Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan	60,49%	63,35%	64,87%	66,28%	67,43%	68,38%	68,38%
	Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD	0	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	0	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD	0	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	0	1	1	1	1	1	1
	Rasio Guru dengan Peserta didik PAUD	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15
	Rasio Guru dengan Peserta didik SD	1 : 16	1 : 18	1 : 20	1 : 21	1 : 23	1 : 24	1 : 24
	Rasio Guru dengan Peserta didik SMP	1 : 16	1 : 18	1 : 20	1 : 23	1 : 24	1 : 26	1 : 26
	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	50	64	64	64	61	60	57
	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah	95	80	100	100	100	100	100
	Terlaksananya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SD	0	80	160	200	240	300	300
	Terlaksananya program pembudayaan bahasa dan sastra daerah dijenjang sekolah SMP	0	30	60	90	106	106	106
	Jumlah penutur muda bahasa daerah	0	1100	2200	2900	3460	4060	4060
	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah	0	5	5	5	5	5	5
	Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	5	8	10	12	13	15	15
	Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	5	8	10	12	13	15	15
	Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	8	8	12	14	16	20	20
	Terlaksananya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan	8	8	12	14	16	20	20
	Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	8	8	12	14	16	20	20
	Terlaksananya pengelolaan koleksi museum	2	2	2	2	2	2	8
IV.	INDIKATOR SPM							

Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen daerah terpencil.	9	10	10	10	10	10	10
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.	511	511	511	511	511	511	511
Setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	189	189	189	189	189	189	189
Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, Kepala sekolah dan staf pendidikan lainnya dan setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruang guru.	75	105	189	189	189	189	189
Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan.	1 : 16	1 : 18	1 : 20	1 : 21	1 : 23	1 : 24	1 : 24
Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran.	1 : 16	1 : 18	1 : 20	1 : 21	1 : 23	1 : 24	1 : 24
Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	83,67	89,14	90	90	90	90	90
Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) telah memiliki sertifikat pendidik	83,67	89,14	90	90	90	90	90
Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pendidikan Kewarganegaraan	83,67	89,14	90	90	90	90	90
Setiap Kabupaten/Kota semua Kepala SD/MI, SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki	83,67	89,14	90	90	90	90	90

	Sertifikat pendidik.							
	Setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan Madrasah berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	83,67	89,14	90	90	90	90	90

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) merupakan instrument yang penting sebagai panduan atau pengarah dalam menjalankan gerak organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, namun renstra bukanlah sesuatu yang bersifat statis apabila bersentuhan dengan pengaruh yang terjadi secara internal maupun eksternal, terlebih dalam perkembangan pembangunan dunia pendidikan yang dinamis.

Namun demikian, berjalannya sebuah organisasi pemerintah tanpa perencanaan adalah sebuah kemustahilan di era persaingan yang semakin ketat dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

Mudah–mudahan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 ini dapat menjadi salah satu panduan penting dalam mengarahkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harapan dapat memenuhi keinginan masyarakat utamanya terhadap pelayanan kependidikan yang berkualitas.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan magfirahNya kepada kita sekalian. Amin.

**Tim Penyusun
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2021-2026**